

Refleksi karakter mahasiswa: implementasi disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas di lingkungan FISHIPOL UNY

Salsabila Nur Aisyah^{a,1}, Eny Kusdarini^{b,2}

¹ salsabila0480fis.2021@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FISIP, UNY

² eny_kusdarini@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan implementasi karakter disiplin dan tanggung jawab dalam berlalu lintas mahasiswa FISHIPOL UNY; 2) mengidentifikasi kendala dalam implementasi karakter disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas mahasiswa FISHIPOL UNY; 3) mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi karakter disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas mahasiswa FISHIPOL UNY. Penelitian ini menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana dengan bantuan software ATLAS.ti ver.24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi karakter disiplin dan bertanggung jawab berlalu lintas mahasiswa FISHIPOL UNY bervariasi. Mayoritas memiliki pemahaman teoritis memadai namun mengalami inkonsistensi dalam implementasi praktis. 2) Faktor penghambat utama meliputi rendahnya internalisasi kesadaran hukum, keterbatasan pengawasan, dan pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung. 3) Upaya untuk mengatasi kendala meliputi pengembangan kesadaran internal sebagai fondasi kepatuhan hukum berlalu lintas, keterlibatan kampus sebagai institusi pendidikan untuk mendukung terciptanya iklim disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas, dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai fasilitator pengembangan internalisasi karakter disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas.

ABSTRACT

This study aims to 1) describe the implementation of discipline and responsibility in traffic among FISHIPOL UNY students; 2) identify obstacles in the implementation of discipline and responsibility in traffic among FISHIPOL UNY students; 3) describe efforts that can be made to overcome obstacles in the implementation of discipline and responsibility in traffic among FISHIPOL UNY students. This study uses the Miles, Huberman, and Saldana analysis model with the assistance of ATLAS.ti ver.24 software. The results of the study indicate that 1) The implementation of discipline and responsibility in traffic among FISHIPOL UNY students varies. The majority have adequate theoretical understanding but experience inconsistency in practical implementation. 2) The main barriers include low internalization of legal awareness, limited supervision, and a social environment that does not sufficiently support such values. 3) Efforts to address these challenges include developing internal awareness as the foundation for traffic law compliance, campus involvement as an educational institution to support the creation of a disciplined and responsible traffic environment, and Citizenship Education as a

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hukum lalu lintas hadir sebagai instrumen normatif untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan. Sayangnya, fenomena tingginya pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat sebagai landasan moral dalam bertindak.

Sejarah Artikel

Diterima : 26-06-2025

Disetujui: 26-06-2025

Kata kunci:

Karakter, Disiplin, Tanggung Jawab, Lalu Lintas

Keywords:

Character, Discipline, Responsibility, Traffic

Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri per Agustus 2024, tercatat sebanyak 79.220 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dari angka tersebut, lebih dari 70% melibatkan kendaraan roda dua, yang merupakan moda transportasi dominan dengan populasi mencapai 76,42%. Sementara itu, data BAPPERIDA DIY juga menunjukkan tren peningkatan kecelakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2023 ke 2024, yakni dari 6.868 kasus menjadi 7.174 kasus (BAPPERIDA DIY, 2024) Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara pemahaman hukum berlalu lintas dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan mahasiswa.

Pelanggaran lalu lintas menjadi fenomena yang umum terjadi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik (FISHIPOL) Universitas Negeri Yogyakarta. Mahasiswa sering mengabaikan aturan dasar seperti berkendara melawan arah, mengabaikan kewajiban menggunakan helm, dan melakukan parkir di tempat yang tidak semestinya. Berbagai insiden kecelakaan dengan tingkat keparahan yang beragam telah terdokumentasi terjadi di area kampus dan sekitarnya. Ironisnya, situasi ini tidak dibarengi dengan program sosialisasi keselamatan berkendara yang efektif, sementara regulasi internal yang secara spesifik mengatur tata tertib berlalu lintas di lingkungan FISHIPOL masih belum tersedia.

Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara pengetahuan teoretis yang mahasiswa peroleh dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan implementasi nilai-nilai karakter dalam praktik sehari-hari, terutama perilaku berlalu lintas. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mempersiapkan generasi muda memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara melalui proses pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran di sekolah (Kerr, 1999). Konsep ini diharapkan dapat membentuk *civic disposition*, yakni sikap kewarganegaraan yang menunjukkan integritas personal dalam ranah kehidupan publik.

Penelitian ini berangkat dari refleksi atas perilaku mahasiswa dalam berlalu lintas, khususnya dalam implementasi nilai kedisiplinan di lingkungan kampus. Fokus utama kajian ini adalah menelaah sejauh mana karakter disiplin teraktualisasi dalam perilaku berlalu lintas mahasiswa FISHIPOL UNY serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan memahami refleksi karakter mahasiswa dalam konteks berkendara, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan kewarganegaraan yang kontekstual dan aplikatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017). Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Kriteria dari subyek penelitian ini adalah mahasiswa aktif FISHIPOL Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu (Suardi, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yakni observasi non-partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion*. Analisis penelitian ini akan menggunakan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti yang merupakan salah satu perangkat lunak untuk mengolah data yang dikembangkan pertama kali di Technical University of Berlin. ATLAS.ti dapat membantu untuk menganalisis data kualitatif dengan menjaga kualitas analisis secara terorganisir dan kolaboratif.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Karakter Disiplin dan Bertanggung Jawab Berlalu Lintas Mahasiswa FISHIPOL UNY

Karakter disiplin dan tanggung jawab merupakan prasyarat penting dalam membangun budaya hukum dan demokrasi yang sehat yang menjadi perhatian dalam pendidikan sosial politik (Sharma & B Sharma, 2022). Salah satu cerminan karakter tersebut dapat dilihat melalui perilaku berlalu lintas, yang mencerminkan sejauh mana nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab telah terinternalisasi dalam diri mahasiswa. Pemaknaan patuh dan disiplin oleh mahasiswa disiplin mengarah pada mengikuti peraturan yang berlaku, seperti patuh terhadap rambu-rambu jalan, menggunakan helm, membawa surat-surat penting berkendara, berkendara sesuai dengan kecepatan yang ditentukan, hingga kelengkapan fisik kendaraan. Hal ini selaras dengan aspek disiplin berkendara yang terdiri dari pemahaman terhadap aturan lalu lintas, bertanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain, kewaspadaan dalam berkendara di lalu lintas, dan kesiapan kondisi kendaraan (Eka Pratiwi & Mustika Kartika Sari, 2023).

Pemaknaan bertanggung jawab oleh mahasiswa FISHIPOL UNY mengarah pada memahami konsekuensi atas tindakan yang akan dilakukan. Memahami konsekuensi akan berkorelasi dengan keselamatan pengguna jalan dan merupakan bagian dari cara untuk menghargai hak-hak pengguna jalan yang lain. Selain itu, apabila telah terjadi sebuah peristiwa yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, maka yang perlu dilakukan sebagai pengendara yang memahami konsekuensi adalah bertanggung jawab menyelesaikan dengan pihak terkait. Selain itu, pemaknaan ini berlanjut pada sikap tanggung jawab dalam berlalu lintas tidak hanya dilihat sebagai hukum yang wajib ditaati, akan tetapi menjadi bagian dari kewajiban moral. Tanggung jawab menjadi suatu kebutuhan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam berlalu lintas. Hal ini selaras dengan aspek bertanggung jawab yang dikemukakan oleh (Mustari, 2014), yakni berani mengakui perbuatan ketika benar atau salah dan berani menerima resiko atas perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan teori pembentukan karakter oleh Lickona terdiri dari *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* (Lickona, 2019) persepsi yang dimiliki oleh mahasiswa FISHIPOL UNY mencerminkan pencapaian pada tahap *moral knowing*. Mahasiswa telah memiliki pemahaman kognitif yang baik mengenai disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas. Selain itu, fenomena ini dapat dilihat menggunakan kacamata teori perkembangan moral Kohlberg yang membagi menjadi tiga tingkat perkembangan dan enam tahap 1) pra-konvensional yang terdiri dari tahap orientasi hukuman dan kepatuhan serta individualisme dan pertukaran, 2) konvensional yang terdiri dari orientasi "anak baik" serta orientasi hukum dan ketertiban, 3) pasca-konvensional yang terdiri dari orientasi kontrak legalistik dan orientasi etika universal (Bertens, 2011). Pemahaman mahasiswa mengenai disiplin dan bertanggung jawab berada pada tingkat tiga (konvensional) tahap empat (orientasi hukum dan ketertiban). Mahasiswa telah memahami pentingnya peraturan lalu lintas dan konsekuensi atas sikap yang diambil. Kepahaman tersebut berbuah pada tahap mengenali bahwa pelanggaran adalah sesuatu yang salah. Selain itu, telah terbangun pula mengenai konsep disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari perwujudan warga negara yang baik.

Selain pemahaman mengenai disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas, penelitian ini mengamati hingga tahap praktik. Praktik disiplin berlalu lintas di kalangan mahasiswa FISHIPOL UNY menunjukkan keberagaman. Artinya pada beberapa hal, peraturan telah ditaati dengan baik dan masih terdapat beberapa pula yang perlu diperhatikan kembali. Apabila dilihat menggunakan kacamata teori pembentukan karakter Lickona yang membaginya menjadi *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral doing* Lickona (2019), implementasi disiplin berlalu lintas ini menunjukkan kesenjangan. Mahasiswa telah memahami peraturan lalu lintas yang ada serta alasan dari keberadaan peraturan tersebut. *Knowing moral values* merupakan pemahaman mengenai nilai-nilai moral seperti disiplin. Munculnya perilaku ketidaksiplinan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri mahasiswa ataupun faktor eksternal. Oleh karenanya, individu yang

memiliki keinginan untuk terus disiplin perlu memahami pentingnya hal tersebut serta dampak yang akan ditimbulkan.

Moral feeling atau perasaan moral adalah kemampuan untuk merasakan konflik batin saat melakukan pelanggaran. Keresahan atas rasa bersalah muncul karena pada dasarnya individu mengetahui sesuatu yang benar (Fitriyani, 2021). Pada implementasi disiplin berlalu lintas, beberapa hal mengenai peraturan masih sering dilanggar. Mahasiswa menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan hal yang salah, namun pada beberapa kondisi pelanggaran tetap dilakukan. Artinya, perasaan bersalah tidak cukup kuat untuk mengalahkan motivasi atau tekanan eksternal yang mendorong terjadinya pelanggaran. Individu seringkali menciptakan pembenaran untuk meredakan ketidaknyamanan psikologis. Hal ini membentuk mekanisme pertahanan diri melalui rasionalisasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tanpa merasa dirinya buruk. Fenomena ini mengarah pada *selective moral action*, yakni tindakan moral hanya diterapkan pada aspek tertentu dan dalam situasi tertentu. Lickona mengklasifikasikan tahap *moral doing* pada tiga komponen, yakni kompetensi, keinginan, dan kebiasaan (Lickona, 2019). Mahasiswa FISHIPOL telah memiliki kompetensi untuk mematuhi aturan dan beberapa pada beberapa hal telah memiliki keinginan yang ditunjukkan melalui perasaan bersalah. Akan tetapi kebiasaan konsisten belum berkembang secara optimal. Sehingga, mahasiswa FISHIPOL berada dalam proses menuju tahap *moral action* yang utuh dengan beberapa perilaku yang telah mencerminkan tindakan moral serta beberapa aspek lain yang masih memerlukan penguatan.

Praktik tanggung jawab berlalu lintas mahasiswa FISHIPOL UNY menunjukkan keberagaman pula. Pada beberapa aspek, tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pelaksanaan pada beberapa aspek lainnya perlu diperhatikan kembali. Analisis ini akan menggunakan kerangka perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat pertama (pra-konvensional) yang pada tahap ini individu berfokus pada kepentingan diri (Bertens, 2011). Perilaku mahasiswa yang mematuhi aturan lalu lintas dengan alasan takut akan razia dan pengawasan polisi berada pada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. Orientasi ini muncul atas motivasi oleh keinginan menghindari konsekuensi negatif yang akan didapatkan seperti tilang atau denda. Sedangkan pada tahap individualisme dan pertukaran tercermin pada alasan kepatuhan mahasiswa ketika merasakan keuntungan untuk diri sendiri seperti menggunakan helm untuk keselamatan pribadi, namun masih melanggar aturan lain yang dianggap tidak berdampak langsung untuk diri sendiri. Perilaku bonceng tiga untuk jarak yang cenderung dekat menunjukkan orientasi pada kepentingan pragmatis seperti menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan kepatuhan penuh.

Pada tingkatan kedua, yakni konvensional yang berfokus pada harapan sosial terdapat dua tahap. Perilaku santun dan menghormati pengguna jalan lain untuk menjaga hubungan interpersonal yang baik menjadi bagian dari tahap ketiga, yaitu orientasi "anak baik" (Bertens, 2013). Praktik saling mengingatkan antar teman dan memberikan kesempatan pada pengguna jalan lain mencerminkan keinginan untuk memenuhi ekspektasi sosial dan menjaga hubungan positif. Tahap keempat, orientasi hukum dan ketertiban tercermin melalui perilaku mahasiswa yang mematuhi peraturan karena telah menyadari pentingnya keteraturan sistem untuk menciptakan kebaikan bersama. Perilaku ini seperti menjaga fasilitas lalu lintas dan kesadaran prioritas bagi pesepeda dan pejalan kaki. Artinya, hal tersebut telah menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya ketertiban sosial.

Pada tingkatan ketiga, yakni pasca-konvensional yang berfokus pada prinsip universal terdapat dua tahap. Tahap kelima, berorientasi pada kontrak sosial yang merupakan tahap lanjutan dari tingkatan kedua telah tercermin dalam sikap berkendara yang mengedepankan menunggu dan memberi kesempatan kepada orang lain serta menjaga kebersihan lingkungan mencerminkan kesadaran mengenai kesejahteraan bersama meski tidak terdapat pengawasan. Pada tahap keenam, yakni orientasi pada prinsip etika universal tercermin dalam perilaku

mahasiswa yang mematuhi peraturan karena berprinsip menghargai dan menjaga keselamatan setiap pengguna jalan. Hal ini telah dilakukan dalam praktik berupa cara memastikan keselamatan berkendara, berhati-hati terhadap pengguna jalan prioritas, dan berkendara dalam keadaan sadar yang menggambarkan komitmen pada prinsip saling menjaga keselamatan.

Mayoritas perilaku tanggung jawab berlalu lintas mahasiswa FISHIPOL UNY berada pada rentang tahap ketiga (orientasi anak baik) hingga tahap kelima (orientasi kontrak sosial). Dominasi tahap tiga tercermin melalui perilaku yang dilakukan atas keinginan untuk menjaga hubungan dan citra positif seperti saling mengingatkan dan menghindari konflik di jalan. Sedang transisi menuju tahap empat berupa kepatuhan terhadap sistem seperti registrasi plat nomor serta menghormati aturan pengguna jalan prioritas. Pada tahap kelima, pemahaman mengenai kontrak sosial yang lebih luas tercermin melalui perilaku yang mengedepankan kesantunan dan memberikan kesempatan pada pengguna lain. Sedang keterbatasan menuju tahap 6 didasari masih terdapat pelanggaran situasional seperti bonceng tiga dan merokok saat berkendara. Kedua pelanggaran tersebut didasari alasan pragmatis berupa penghematan tenaga serta pelampiasan emosi di jalan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip universal belum sepenuhnya terinternalisasi.

Fenomena kesenjangan pemahaman dengan implementasi praktis dalam perilaku berlalu lintas di kalangan mahasiswa FISHIPOL UNY mencerminkan ketidakutuhan proses pembentukan karakter moral seperti yang diuraikan dalam teori Lickona. Meskipun mahasiswa telah menunjukkan perkembangan yang memadai pada aspek kognitif (*moral knowing*) serta memiliki kepekaan emosional (*moral feeling*) terhadap nilai-nilai etika berlalu lintas, mereka belum berhasil mengintegrasikan kedua aspek tersebut menjadi pola tindakan yang konsisten (*moral action*). Observasi empiris menunjukkan bahwa kepatuhan mahasiswa terhadap regulasi lalu lintas cenderung bersifat situasional dan kontekstual. Artinya kepatuhan hanya dilakukan ketika mendapatkan pengawasan dari pihak terkait seperti kepolisian.

Melalui perspektif teori perkembangan moral Kohlberg, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas mahasiswa masih berada pada level konvensional tahap keempat yang berorientasi pada hukum dan ketertiban. Pada tahap ini, individu menganggap kepatuhan terhadap aturan sebagai sesuatu yang penting untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah kekacauan kolektif. Fenomena pelanggaran yang tetap dilakukan meskipun mereka memahami dengan baik implikasi dari tindakan tersebut mengindikasikan ketidakstabilan posisi mahasiswa dalam tahap ini. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa belum berhasil mencapai tahap pasca-konvensional dalam perkembangan moral. Artinya, kepatuhan belum didasarkan pada prinsip-prinsip etis universal yang telah terinternalisasi dalam diri.

2. Kendala Implementasi Karakter Disiplin dan Bertanggung Jawab Berlalu Lintas Mahasiswa FISHIPOL UNY

Implementasi disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas mahasiswa FISHIPOL UNY menghadapi berbagai kendala yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

a. Kendala Internal

Kendala internal dalam implementasi karakter disiplin dan tanggung jawab dalam berlalu lintas mahasiswa mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan dan memerlukan perhatian. Pertama, inkonsistensi perilaku mahasiswa dalam berkendara menjadi perwujudan nyata dari adanya kesenjangan *moral knowing* dan *moral doing*. Dalam pembentukan karakter, terdapat tiga tahap yang perlu dilalui individu, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral doing* (Lickona, 2019) *Moral knowing* dalam konteks berlalu lintas adalah kondisi mahasiswa yang telah memiliki pemahaman tentang tata cara dan perilaku yang baik dalam berlalu lintas. Sedangkan *moral doing* dalam konteks berlalu

lintas yaitu kondisi individu yang telah mengimplementasikan pengetahuan yang telah dimiliki.

Mahasiswa telah memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya disiplin berlalu lintas seperti menggunakan helm berstandar SNI, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta berkendara dengan kecepatan sesuai batas aman. Dalam implementasinya, mahasiswa seringkali mengabaikan pengetahuan tersebut dengan berbagai alasan seperti terburu-buru, menganggap pelanggaran kecil tidak berbahaya, serta adanya *peer pressure* dari lingkungan sekitar.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah keterbatasan penglihatan yang dialami sebagian mahasiswa, dimana kondisi ini menyebabkan pandangan menjadi kabur saat berkendara sepeda motor, terutama pada kondisi cuaca buruk atau pencahayaan yang kurang memadai. Keterbatasan fisik ini seringkali tidak disadari sepenuhnya oleh mahasiswa atau bahkan diabaikan dengan alasan praktis dan ekonomis. Kondisi mata minus, silinder, atau gangguan penglihatan lainnya yang tidak dikoreksi dengan kacamata atau lensa kontak yang tepat menciptakan risiko berlipat dalam berkendara. Keterbatasan fisik ini tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial terhadap pengguna jalan lainnya, termasuk pejalan kaki, pengendara lain, dan penumpang kendaraan umum.

Kombinasi antara inkonsistensi perilaku yang didorong oleh faktor psikologis dan sosial, serta keterbatasan fisik yang tidak diantisipasi dengan baik melalui langkah-langkah preventif yang memadai, menunjukkan bahwa implementasi karakter disiplin dan tanggung jawab dalam berlalu lintas masih menghadapi hambatan serius dan kompleks dari aspek internal mahasiswa yang memerlukan pendekatan holistik dalam penanganannya.

b. Kendala Eksternal

Pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga ditentukan oleh dinamika lingkungan eksternal yang kompleks. Berbagai elemen di luar diri mahasiswa turut berperan menciptakan kondisi yang seringkali justru menghambat internalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab dalam berlalu lintas. Faktor-faktor eksternal ini membentuk suatu ekosistem sosial yang dapat mendorong atau justru menghambat terwujudnya perilaku tertib, sehingga menjadi determinan penting yang perlu dipahami secara mendalam. Interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan sosialnya menciptakan pola-pola perilaku yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai ideal yang ingin ditanamkan, mengingat adanya berbagai tekanan situasional dan struktural yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam berkendara. Kompleksitas faktor eksternal ini menunjukkan bahwa upaya pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan seluruh aspek lingkungan yang berinteraksi dengan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pertama, faktor geografis berupa jarak tempuh antara tempat tinggal mahasiswa dan kampus yang relatif jauh turut menjadi pertimbangan pragmatis dalam mengambil keputusan untuk mencari jalan pintas atau melakukan pelanggaran aturan demi mencapai efisiensi waktu dan biaya transportasi. Sejumlah mahasiswa yang berdomisili di wilayah pinggiran kota atau daerah dengan akses transportasi terbatas mengaku sering melakukan pelanggaran seperti melawan arus lalu lintas atau melewati jalur yang dilarang sebagai respons terhadap minimnya alternatif akses jalan atau kemacetan yang parah pada jam-jam sibuk. Jarak rumah yang jauh dari kampus memperbanyak kesempatan untuk melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi.

Kebanyakan pelanggaran dilakukan ketika belum memasuki area yang padat dan mulai banyak *traffic light*. Fenomena ini termasuk faktor sarana prasarana karena sepiunya kondisi jalan di sekitar tempat tinggal serta minimnya *traffic light* menciptakan ruang untuk berkendara dengan kecepatan tinggi (Soekanto, 2019). Sedangkan minimnya pengawasan dari kepolisian baik secara langsung atau melalui sistem e-tilang akan menghasilkan persepsi “aman” untuk melakukan pelanggaran termasuk dalam faktor penegak hukum.

Kedua, pengaruh lingkungan sosial memiliki dampak yang sangat signifikan, khususnya melalui tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*). Mahasiswa yang secara konsisten mengamati teman-teman sepeergaulannya melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa mendapat sanksi yang tegas cenderung memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat ditoleransi. Norma sosial yang bersikap permisif dan longgar terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas menjadi hambatan serius bagi tumbuhnya kesadaran hukum yang kuat dan internalisasi nilai-nilai kedisiplinan. Lingkungan sekitar kampus cenderung padat dan memuat beberapa pusat kota seperti sekolah, kantor, hingga tempat hiburan sehingga orang-orang yang berada di area ini bersikap lebih hati-hati. Selain itu, lazimnya kepolisian akan memperketat pengawasan di daerah yang padat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketiga, faktor perbedaan budaya ini berkorelasi dengan faktor masyarakat. Pada area sekitar rumah, mahasiswa melanggar karena adanya “normalisasi” pelanggaran dengan menciptakan persepsi “tidak berbahaya”, sedangkan pada area sekitar kampus mahasiswa cenderung tidak patuh karena adanya konformitas sosial seperti mahasiswa mengikuti arus perilaku dominan dari pengendara lain untuk menghindari konflik sosial. Fenomena kepatuhan situasional yang hanya muncul ketika terdapat pengawasan otoritas mencerminkan adanya permasalahan dalam dua kompetensi kewarganegaraan. Dari perspektif *civic knowledge*, teridentifikasi bahwa pemahaman substansif mahasiswa mengenai signifikansi kepatuhan hukum berlalu lintas belum terintegrasi secara holistik dalam struktur kognitif sebagai warga negara. Literasi kewarganegaraan yang dimiliki cenderung superfisial, artinya masih terbatas pada akumulasi informasi prosedural dan pengetahuan tentang regulasi tanpa disertai pemahaman tentang rasionalitas sosial dan filosofis di balik setiap aturan lalu lintas. Apabila hal ini terus dibiarkan, dapat terjadi adanya fenomena *failed citizenship* yang ditunjukkan pada kepatuhan terhadap aturan hanya menjadi respons terhadap kontrol eksternal (Banks, 2017).

Berdasarkan kendala implementasi karakter disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas mahasiswa FISHIPOL UNY, tampak jelas bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas yang tinggi dengan akar masalah yang bersifat multidimensional. Kesenjangan antara *moral knowing* dan *moral doing* yang menjadi inti kendala internal, dikombinasikan dengan berbagai tekanan eksternal seperti faktor geografis, pengaruh sosial, dan perbedaan budaya, menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak dapat direduksi menjadi sekadar proses transfer pengetahuan. Fenomena kepatuhan situasional yang hanya muncul ketika ada pengawasan otoritas mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan, dimana pemahaman tentang hukum masih bersifat superfisial dan belum menyentuh aspek filosofis serta rasionalitas sosial di balik setiap regulasi. Kondisi ini berpotensi mengarah pada *failed citizenship* jika tidak segera diatasi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembentukan karakter yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengintegrasikan pengondisian lingkungan sosial dan struktural yang

mendukung konsistensi implementasi nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa.

3. Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab dalam Berlalu Lintas Mahasiswa FISHIPOL UNY

Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas, khususnya di kalangan mahasiswa. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas mengindikasikan perlunya penanganan komprehensif dan terstruktur. Penelitian ini mengkaji berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi karakter disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas pada mahasiswa FISHIPOL UNY melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek individual, institusional, dan pedagogis.

a. Penguatan Kesadaran Internal sebagai Fondasi Kepatuhan

Upaya fundamental dalam mengatasi problematika kepatuhan berlalu lintas terletak pada pembentukan kesadaran internal mahasiswa sebagai pengguna jalan raya. Berdasarkan kerangka teori pembentukan karakter Lickona (2019), mahasiswa telah menguasai tahap *moral knowing* yang tercermin melalui pemahaman kognitif terhadap regulasi lalu lintas dan strategi pencegahan pelanggaran. Mahasiswa memiliki kesadaran untuk mempersiapkan rencana berkendara yang matang, termasuk memperhitungkan waktu tempuh, jarak, dan memastikan kesiapan fisik sebelum berkendara. Namun demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara pengetahuan normatif dengan implementasi perilaku di lapangan. Tahap *moral feeling* belum tercapai secara optimal, sehingga ketika menghadapi kondisi tidak ideal seperti terburu-buru, emosi, atau kelelahan, komitmen untuk tertib berlalu lintas cenderung melemah. Konsekuensinya, tahap *moral doing* menunjukkan inkonsistensi yang tidak selaras dengan pengetahuan yang dimiliki.

Selain kesadaran individual memiliki fungsi sebagai fondasi utama dalam konstruksi kepatuhan yang berkelanjutan, keberadaan sistem pendukung eksternal juga memegang peranan penting dalam membentuk ekosistem yang memfasilitasi proses internalisasi nilai secara komprehensif. Kesadaran personal sebagai variabel intrinsik memerlukan resonansi dengan stimulus lingkungan yang secara konsisten memperkuat orientasi nilai yang diharapkan (Prasetyo, 2024). Kampanye tertib berlalu lintas berperan sebagai sistem pendukung eksternal yang memperkuat proses internalisasi nilai secara komprehensif. Dalam perspektif teori kepatuhan hukum Friedman (2015), kampanye berfungsi sebagai pengingat substansi hukum yang mencakup peraturan lalu lintas beserta konsekuensinya. Namun, efektivitas kampanye yang ada masih terbatas karena cenderung menekankan aspek "*what*" daripada "*why*" suatu peraturan penting untuk ditaati. Optimalisasi efektivitas kampanye dapat dicapai melalui pendekatan multidimensional yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan regulatif, tetapi juga mengeksplorasi fondasi nilai moral dan sosial yang menjadi dasar peraturan tersebut. Pendekatan ini memfasilitasi terbentuknya hubungan yang lebih mendalam antara regulasi dengan nilai-nilai personal individu, sehingga kepatuhan tidak semata-mata didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi, melainkan pada kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Kepatuhan sejati muncul ketika nilai-nilai hukum terinternalisasi sebagai bagian integral dari budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kesadaran individual dan dukungan eksternal melalui kampanye untuk memfasilitasi terbentuknya kepatuhan yang komprehensif. Dalam ekosistem tersebut, proses internalisasi nilai disiplin dan tanggung jawab menjadi komponen sosial kolektif yang saling terhubung demi keselamatan dan kesejahteraan bersama.

b. Peran Kampus dalam Menciptakan Iklim Disiplin dan Tanggung jawab Berlalu Lintas

Upaya meningkatkan kepatuhan berlalu lintas mahasiswa membutuhkan partisipasi aktif dari institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi, sebagai entitas institusional, memiliki wewenang, organisasi, dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk membangun atmosfer yang mendukung kedisiplinan dan sikap bertanggung jawab dalam lingkungan akademis. Mahasiswa berperan sebagai motor perubahan melalui tindakan personal, sementara kampus berfungsi sebagai penyelenggara yang menyiapkan kondisi yang kondusif. Merujuk pada konsep sistem hukum Friedman (2015), terwujudnya ketaatan hukum dalam komunitas termasuk komunitas kampus ditentukan oleh keseimbangan tiga komponen kunci, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Substansi hukum termanifestasi dalam peraturan dan kebijakan kampus mengenai ketertiban berlalu lintas. FISHIPOL UNY telah memberlakukan sejumlah ketentuan seperti pelarangan parkir tidak pada tempatnya disertai sanksi. Akan tetapi, kebijakan tersebut belum diintegrasikan secara komprehensif dalam kerangka pembentukan karakter mahasiswa. Sebagai lembaga pendidikan, kampus berwenang merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih substansial, seperti verifikasi KTM dan STNK sebelum akses ke kawasan kampus. Selanjutnya, ketaatan berlalu lintas dapat dimasukkan dalam sistem pembelajaran melalui orientasi mahasiswa baru, program pengabdian kepada masyarakat, atau mata kuliah yang mengasah kompetensi kewarganegaraan. Strategi ini sejalan dengan konsep Supandi et al., (2017) tentang urgensi internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pendidikan tinggi.

Dari aspek **struktur hukum**, petugas keamanan kampus memegang peranan vital sebagai eksekutor pengawasan. Meski tidak memiliki otoritas setara aparat kepolisian, keberadaan satpam dapat membantu mengatur alur lalu lintas dan menangani pelanggaran ringan. Namun, pengawasan ini masih memiliki keterbatasan. Diperlukan sinergi antara unit keamanan dan bagian kemahasiswaan dalam mengembangkan sistem *reward and punishment* yang terorganisir dan bersifat edukatif. Konsistensi dalam penerapan struktur hukum diperlukan agar peraturan dapat dikomunikasikan dengan jelas dan berkelanjutan kepada seluruh civitas akademika (Prasetyo, 2024).

Sementara itu, **kultur hukum** yang berkembang di lingkungan kampus saat ini masih memperlihatkan rendahnya kepedulian bersama terhadap urgensi ketertiban lalu lintas. Praktik seperti membonceng lebih dari kapasitas atau tidak memakai helm telah menjadi kebiasaan yang dianggap normal di sekitar kampus. Padahal, mahasiswa sebenarnya mengetahui bahwa perilaku tersebut melanggar aturan. Namun, anggapan bahwa "semua orang berbuat sama" menciptakan lingkaran ketidakpatuhan yang sulit dihentikan. Karenanya, perubahan kultur hukum memerlukan strategi sistemik dan partisipatif, seperti gerakan kampanye bersama, keterlibatan organisasi mahasiswa, pembentukan duta ketertiban lalu lintas, serta kolaborasi strategis dengan lembaga eksternal seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan (Prasetyo, 2024).

Secara menyeluruh, peran kampus dalam membangun iklim disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas harus bersifat transformatif, bukan hanya menyediakan prasarana fisik. Kampus perlu menghadirkan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter kewarganegaraan yang solid. Sinkronisasi antara substansi hukum yang tegas, struktur pengawasan yang

konsisten namun manusiawi, serta kultur hukum yang supportif akan menjadi dasar pembentukan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga berintegritas sebagai warga negara yang taat hukum.

c. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Internalisasi Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Berlalu Lintas

Penerapan karakter disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas pada mahasiswa membutuhkan strategi pendidikan yang bersifat transformatif. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis sebagai media pembentukan karakter dan kesadaran hukum. Berdasarkan teori Kepatuhan Hukum Friedman dan konsep pembentukan karakter Lickona, terdapat disparitas antara penguasaan konseptual mahasiswa dengan aplikasi riil dalam perilaku berlalu lintas. Disparitas ini mengindikasikan perlunya penguatan pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai kewarganegaraan. Kerr (1999) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menyiapkan generasi muda dalam menjalankan peran dan kewajiban sebagai warga negara melalui jalur pendidikan formal. Pandangan ini sejalan dengan Margaret S. Branson (1999) yang menekankan urgensi pengembangan civic competence yang mencakup tiga komponen fundamental, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Ketiga dimensi ini saling berkorelasi dan menjadi landasan pembentukan warga negara yang berkarakter hukum dan bertanggung jawab.

Namun, hasil riset menunjukkan bahwa internalisasi karakter kewarganegaraan, khususnya berkaitan dengan disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas, belum dielaborasi secara eksplisit dalam praktik Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kurikulum cenderung menekankan topik-topik makro seperti konstitusi, sistem ketatanegaraan, dan patriotisme, sedangkan nilai-nilai praktis sehari-hari seperti kedisiplinan lalu lintas tidak mendapat perhatian proporsional. Konsekuensinya, muncul ketidakseimbangan antara *civic knowledge* yang diperoleh secara akademis dan *civic disposition* yang seharusnya terefleksi dalam tindakan. Kesenjangan ini didukung oleh penelitian Rismayanti et al., (2023) yang mengidentifikasi bahwa pendekatan pengajaran yang *overly theoretical* dan kondisi lingkungan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum turut menyebabkan lemahnya internalisasi nilai. Mahasiswa memperoleh nilai-nilai etika kewarganegaraan secara formal, namun dalam kenyataan sosial, mereka tetap berhadapan dengan praktik-praktik pelanggaran hukum yang dianggap wajar.

Dalam konteks kepatuhan lalu lintas, *civic disposition* menjadi faktor penentu karena terkait langsung dengan kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial, dan etika publik. Tanpa fondasi karakter kewarganegaraan yang solid, akumulasi pengetahuan dan kemampuan tidak akan mampu menghasilkan perilaku tertib berlalu lintas yang berkelanjutan. Mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan langkah sistematis melalui kolaborasi multipihak. Kampus dapat menjalin kemitraan dengan kepolisian untuk memperluas akses informasi dan edukasi hukum, terutama bagi mahasiswa perantau. Selain itu, inovasi metode pengajaran perlu diprioritaskan, termasuk melalui strategi *experiential learning* di luar kelas seperti aktivitas organisasi mahasiswa, proyek pengabdian masyarakat, dan laboratorium kewarganegaraan.

Pendekatan berbasis budaya menjadi salah satu strategi efektif dalam menginternalisasi nilai karakter. Pendekatan budaya memiliki daya dalam menciptakan konteks yang familiar bagi mahasiswa, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan tidak terkesan asing atau menggurui (Selviani, 2021). Proses ini tidak hanya menyentuh ranah kognitif,

tetapi juga aspek emosional dan sosial yang signifikan dalam pembentukan civic disposition. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kapasitas besar sebagai wahana transformasi karakter mahasiswa. Melalui penguatan kurikulum yang implementatif, pendekatan budaya, serta integrasi antara pembelajaran teoretis dan praktik sosial, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai nilai-nilai hukum, tetapi juga mengaplikasikannya secara holistik dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam ketertiban berlalu lintas. Inilah sumbangsih nyata pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab.

Simpulan

Implementasi karakter disiplin dan tanggung jawab berlalu lintas di kalangan mahasiswa FISHIPOL UNY menghadapi kesenjangan antara pemahaman kognitif (*moral knowing*) dan kesadaran emosional (*moral feeling*) yang sudah baik dengan tindakan moral konsisten (*moral action*) yang belum optimal. Fenomena ini disebabkan oleh faktor lingkungan sosial, budaya permisif, lemahnya pengawasan, serta kepatuhan yang masih bersifat situasional belum didasari kesadaran etis mendalam. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai fasilitator strategis pembentukan karakter menghadapi kendala kurikulum yang terlalu teoritis dan kurang terintegrasi dengan nilai aplikatif kehidupan sehari-hari. Solusinya memerlukan pendekatan holistik melalui pembaruan kurikulum, pembelajaran berbasis pengalaman, pendekatan budaya, dan kolaborasi strategis kampus dengan institusi eksternal untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembentukan karakter kewarganegaraan utuh, sehingga menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual sekaligus bertanggung jawab sebagai warga negara taat hukum.

Referensi

- Banks, A. J. (2017). Failed Citizenship and Transformative Civic Education. *Educational Reseacher* , 46.
- BAPPERIDA DIY. (2024). *Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas* . Pemda DIY .
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Eka Pratiwi, H., & Mustika Kartika Sari, M. (2023). Tingkat Disiplin Berlalu Lintas Remaja Milenial di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* , 11. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n2.p510-524>
- Fitriyani, I. (2021). Implementasi Teori Thomas Lickona terhadap Problem Ketidakjujuran. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* . <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v4i1.932>
- Friedman, L. (2015). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (N. Mangunsong, Ed.). Nusa Media .
- Kerr. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. National Foundation for Educational Research.
- Lickona, T. (2019). *Mendidik untuk Membentuk Karakter Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung jawab* (U. Wahyudin, Ed.). Bumi Aksara.
- Margaret S. Branson. (1999). *Belajar "Civic Education" dari Amerika*. LKiS Yogyakarta.
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Remaja Rosdakarya .
- Mustari. (2014). *Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan*. Raja Grafindo Utama.

- Prasetyo, W. (2024). *Peran Polisi Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara di Bawah Umur*. Universitas Islam Sultan Agung .
- Rismayanti, Tabrani Rasyid, A., Ahmad, & Rusdi, M. (2023). Internalization of Civic Disposition Values Through Civic Education Learning at SMA Negeri 30 Bone. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 8. <http://dx.doi.org/10.58258/jupe.v8i4.6143>
- Selviani, G. (2021). Revitalisasi Perilaku Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Dikalangan Pelajar Melalui Mata Pelajaran Pkn Di Sma Negeri 1 Kota Pinang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, 1, 1–8.
- Sharma, A., & B Sharma, P. (2022, May). Responsible Citizenship and a Law-abiding Society must for National Development. *Modern Ghana*.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press .
- Suardi, I. W. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Gawe Buku .
- Supandi, Fajar, A., & Muriman, C. (2017). *Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.